



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2025



<https://dp2kbp3a.tanahlautkab.go.id>



dp3ap2kbtanahlaut

3.2. Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Tanah Laut

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

Tabel 3.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
Urusan Wajib						
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif = 43 ----- x 100% Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun) = 43	100%	DP3AP2KB
		2	Persentase Perempuan korban kekerasan dan tindak perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif = 21 ----- x 100.000 Jumlah Perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang = 21	100%	DP3AP2KB

14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate/TFR</i>) per Wanita usia subur usia 15-49 Tahun	Total Fertility Rate/TFR Kab/kota = 2,20 ----- x 100% Target Fertility Rate/TFR Kab/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap Kab/Kota yang bersangkutan = 2,19	100,46%	DP3AP2KB	
		2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/ <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate</i> (mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 44,303 ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur 15-49 Tahun = 58,516	75,71%	DP3AP2KB	
		3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota = 4,93 ----- x 100% Target persentase kebutuhan ber-keluarga berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk provinsi yang bersangkutan = 7,60	64,87%	DP3AP2KB	

Pelaihari, 30 Januari 2026

Mengetahui,
Kepala Dinas P3AP2KB Tanah Laut



MARIA ULFAH, S.Psi., MM
NIB. 197911132008012008

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota

IKK No. 2.b.1

Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Memastikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi anak dalam mendapatkan layanan secara cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi
2. Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$ $= \frac{43}{43} \times 100\%$ $= 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ Pembilang 1. Jumlah anak yang mendapatkan perlindungan khusus di Kabupaten/Kota yaitu anak yang telah terlayani secara komprehensif; 2. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya, diantaranya: a. anak dalam situasi darurat b. anak dalam berhadapan dengan hukum c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi e. anak yang dieksploitasi secara seksual f. anak yang menjadi korban NAPZA, pornografi, g. anak dengan HIV/AIDS h. anak korban TPPO 3. Layanan Komprehensif adalah layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan anak secara menyeluruh, berkualitas, dan tuntas dengan pendekatan manajemen kasus secara tepat oleh tenaga profesional, fungsi layanan meliputi: a. Pengaduan Masyarakat; b. Penjangkauan Korban; c. Pengelolaan Kasus;

		d. Penampungan Sementara; e. Mediasi; dan f. Pendampingan Korban. ▪ Penyebut 1. Jumlah keseluruhan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus; 2. Anak Memerlukan Perlindungan Khusus adalah Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak dengan HIV/AIDS, Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban jaringan terorisme, Anak penyandang disabilitas, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya; 3. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Data Pendukung	:	▪ Pembilang dan Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung, berupa surat pernyataan yang Ditandatangani oleh kepala dinas PPPA, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat data antara lain: a. Rekapitulasi jumlah keseluruhan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif; b. Rekapitulasi jumlah seluruh anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota.

6. Sumber Data	: 	Sumber Data Pembilang dan Penyebut: 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota; 2. Rincian data antara lain: a. Rincian jumlah keseluruhan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan pelayanan secara komprehensif; b. Rincian jumlah seluruh anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota. 3. Apabila rincian melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: a. Halaman 1 (Judul); b. Halaman pertengahan; c. Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala dinas/badan/kantor; dan d. Dapat menggunakan <i>link google drive</i> atau sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	: 	Permen PPPA Nomor 2 tahun 2022 tentang standar pelayanan perlindungan perempuan dan anak



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. A.Syairani Komp. Perkantoran Gagah, Pelaihari 70814
Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

JUMLAH ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS YANG
TERLAYANI SECARA KOMPREHENSIF KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Laporan	Jenis Penanganan	Jumlah AMPK Yang Terlayani	Jumlah Keseluruhan AMPK	Total Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tanah Laut	Kekerasan fisik	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	4	4	100	
			Pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, pendampingan (Konseling)	1	1	100	
			Pengaduan, pengelolaan kasus, mediasi	1	1	100	
2.	Tanah Laut	Kekerasan psikis	Pengaduan, pengelolaan kasus pendampingan (Pemeriksaan psikologis/Konseling)	7	7	100	
3.	Tanah Laut	Kekerasan seksual	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	14	14	100	
4.	Tanah Laut	Trafficking	Pengaduan, pengelolaan kasus, penampungan sementara di RPS, pendampingan (Pemeriksaan psikologis dan pemulangan)	1	1	100	
5.	Tanah Laut	Lainnya	Pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, pendampingan (Konseling)	2	2	100	
			Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	7	7	100	
			Pengaduan, pengelolaan kasus, penampungan sementara di RPS, pendampingan (Konseling dan pemulangan)	4	4	100	
			Pengaduan, pengelolaan kasus, mediasi	2	2	100	
J u m l a h				43	43	100	

Sumber Data : UPTD PPA/DP3AP2KB Kab. Tanah Laut

Pelaihari, 13 Februari 2026

Kepala Dinas,



MARIA ULFAH, S.Psi, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197911132005012008



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. A.Syairani Komp. Perkantoran Gagah, Pelaihari 70814
Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

**RINCIAN DATA JUMLAH KESELURUHAN ANAK YANG MEMERLUKAN
PERLINDUNGAN KHUSUS KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

No	Nama (Inisial)	Kabupaten/ Kota	Alamat	Jenis Laporan	Jenis Penanganan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	P A	Tanah Laut	Ds. Kunyit Kec. Bajuin	Dugaan korban kekerasan psikis	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Konseling)	
2	K A S	Tanah Laut	Kel. Panggung Kec. Pelaihari	Dugaan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
3	G A M S	Tanah Laut	Kel. Panggung Kec. Pelaihari	Dugaan korban kekerasan fisik dalam rumah tangga	Pengaduan, pengelolaan, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
4	M R	Tanah Laut	Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari	Dugaan korban kekerasan psikis	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Konseling)	
5	M H	Tanah Laut	Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	Kekerasan seksual/persetubuhan	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
6	I S	Tanah Laut	Ds. Ujung Baru Kec. Bati-Bati	Perubahan perilaku	Pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus	
7	K R	Tanah Laut	Kel. Angsau Kec. Pelaihari	Kekerasan seksual/pencabulan	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
8	S P Q	Tanah Laut	Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	Kekerasan seksual/pencabulan	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
9	A R	Tanah Laut	Ds. Sumber Mulia Kec. Pelaihari	Anak Berhadapan Hukum (Kekerasan seksual)	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
10	D M A	Tanah Laut	Ds. Bumi Jaya Kec. Pelaihari	Kekerasan seksual/persetubuhan	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
11	N A K	Tanah Laut	Ds. Batu Tungku Kec. Panyipatan	Dugaan korban kekerasan fisik/psikis	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Konseling)	

12	M R	Tanah Laut	Ds. Jilatan Kec. Batu Ampar	Anak Berhadapan Hukum (Kekerasan seksual)	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
13	S A	Tanah Laut	Ds. Banyu Irang Kec. Bati-Bati	Kekerasan seksual/persetubuhan	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
14	M H	Tanah Laut	Ds. Takisung Kec. Takisung	Kekerasan seksual/pencabulan	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
15	A N H	Tanah Laut	Ds. Pagatan Besar Kec. Takisung	Kekerasan seksual/pencabulan	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
16	E A	Tanah Laut	Ds. Takisung Kec. Takisung	Mengganggu Ketertiban Umum	Pengaduan, pengelolaan kasus, penampungan sementara di RPS, pendampingan (konseling dan pemulangan)	
17	S N	Tanah Laut	Ds. Gunung Melati Kec. Batu Ampar	Mengganggu Ketertiban Umum	Pengaduan, pengelolaan kasus, penampungan sementara di RPS, pendampingan (konseling dan pemulangan)	
18	N R	Tanah Laut	Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	Mengganggu Ketertiban Umum	Pengaduan, pengelolaan kasus, penampungan sementara di RPS, pendampingan (konseling dan pemulangan)	
19	R	Tanah Laut	Ds. Pagatan Besar Kec. Takisung	Mengganggu Ketertiban Umum	Pengaduan, pengelolaan kasus, penampungan sementara di RPS, pendampingan (konseling dan pemulangan)	
20	N F P	Tanah Laut	Ds. Durian Bungkok Kec. Batu Ampar	Kekerasan seksual/persetubuhan	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
21	M R	Tanah Laut	Ds. Padang Luas Kec. Kurau	Dugaan korban kekerasan fisik	Pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus	
22	N Z	Tanah Laut	Ds. Ambungan Kec. Pelaihari	Kekerasan seksual/persetubuhan	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
23	M K	Tanah Laut	Ds. Batakan Kec. Panyipatan	Anak Berhadapan Hukum (Pembakaran Monumen Kapal)	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
24	M G F	Tanah Laut	Ds. Damit Hulu Kec. Batu Ampar	Dugaan Korban Penelantaran	Pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus	
25	A	Tanah Laut	Ds. Batakan Kec. Panyipatan	Kasus kekerasan seksual/Pencabulan	Pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	

26	A H	Tanah Laut	Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	Dugaan Korban Penelantaran	Pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, mediasi	
27	J N A	Tanah Laut	Ds. Panggung Kec. Pelaihari	Dugaan korban perundungan psikis	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
28	R N W	Tanah Laut	Ds. Batu Ampar Kec. Batu Ampar	Kekerasan seksual/persetubuhan	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
29	O R A	Tanah Laut	Ds. Sambangan Kec. Bati-Bati	Perdagangan orang/eksploitasi ekonomi secara seksual	Pengaduan, pengelolaan kasus, penampungan sementara di RPS, pendampingan (Pemeriksaan psikologis dan pemulangan)	
30	M B	Tanah Laut	Ds. Ketapang Kec. Bajuin	Kekerasan fisik/psikis dalam rumah tangga (KDTR)	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
31	S M K	Tanah Laut	Ds. Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	Kekerasan seksual/Pencabulan	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
32	R	Tanah Laut	Ds. Asam-Asam Kec. Jorong	Kekerasan seksual//Pencabulan	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
33	M S	Tanah Laut	Ds. Bumi Asih Kec. Panyipatan	Kekerasan seksual/Persetubuhan	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
34	M A	Tanah Laut	Ds. Tanjung Kec. Bajuin	Anak Berhadapan Hukum kasus kekerasan seksual	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
35	R R	Tanah Laut	Ds. Galam Kec. Bajuin	Kekerasan fisik/Korban perkelahan/pengeroyokan	Pengaduan, pengelolaan kasus, mediasi	
36	M N F	Tanah Laut	Ds. Tampang Kec. Pelaihari	Pelaku perkelahan/pengeroyokan	Pengaduan, pengelolaan kasus, mediasi	
37	N P	Tanah Laut	Ds. Pasir Putih Kec. Kintap	Pelaku perkelahan/pengeroyokan	Pengaduan, pengelolaan kasus, mediasi	
38	S F N H	Tanah Laut	Ds. Gunung Makmur Kec. Takisung	Kekerasan psikis (masalah orang tua)	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
39	A R	Tanah Laut	Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari	Anak Berhadapan Hukum kasus kekerasan seksual	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
40	K W	Tanah Laut	Ds. Tajau Pecah Kec. Batu Ampar	Dugaan kekerasan psikis	Pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, pendampingan (Konseling)	
41	D F L	Tanah Laut	Kel. Angsau Kec. Pelaihari	Kekerasan psikis (masalah orang tua)	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
42	M M H A	Tanah Laut	Kel. Angsau Kec. Pelaihari	Kekerasan psikis (masalah orang tua)	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan	

					(Pemeriksaan psikologis)	
43	A S	Tanah Laut	Kel. Angsau Kec. Pelaihari	Anak Memerlukan Penanganan Khusus	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
J u m l a h						

Sumber Data: UPTD PPA/DP3AP2KB Kab. Tanah Laut

Pelaihari, 13 Februari 2026

Kepala Dinas,



MARIA ULFAH, S.Psi, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197911132005012008

IKK No. 2.b.2

Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur capaian layanan komprehensif terhadap perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang
2. Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang}} \times 100\%$ $= \frac{21}{21} \times 100\%$ $= 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ Pembilang 1. Jumlah perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif di Kabupaten/Kota; 2. Layanan Komprehensif adalah layanan yang diberikan dalam rangka pemenuhan hak dan kebutuhan penerima manfaat secara menyeluruh, berkualitas, dan tuntas dengan pendekatan manajemen kasus secara tepat oleh tenaga profesional, fungsi layanan meliputi: a. Pengaduan Masyarakat; b. Penjangkauan Korban; c. Pengelolaan Kasus; d. Penampungan Sementara; e. Mediasi; dan f. Pendampingan Korban. ▪ Penyebut 1. Jumlah keseluruhan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten/Kota; 2. Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau

		mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah privat atau publik, dan juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); 3. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi; 1. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota.
5. Data Pendukung :		▪ Pembilang dan Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung, berupa surat pernyataan yang Ditandatangani oleh kepala dinas PPPA, berkop surat dan stempel resmi, mencantumkan tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan yang memuat data antara lain: a. Rekapitulasi jumlah perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang yang mendapatkan layanan komprehensif di Kabupaten/Kota; b. Rekapitulasi jumlah keseluruhan perempuan korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten/Kota



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jln. A.Syairani Komp. Perkantoran Gagah, Pelaihari 70814
Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

**JUMLAH PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN
KOMPREHENSIF KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

No	Kabupaten/ Kota	Jenis Laporan	Jenis Penanganan	Jumlah Perempuan Korban Yang Terlayani	Jumlah Keseluruhan Perempuan Korban	Total Capaian (%)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tanah Laut	Kekerasan fisik	Pengaduan, pengelolaan kasus, konsultasi, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	5	5	100	
2.	Tanah Laut	Kekerasan seksual	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	1	1	100	
3.	Tanah Laut	Kekerasan psikis	Pengaduan, pengelolaan kasus, konsultasi, penadampingan (Pemeriksaan psikologis)	5	5	100	
4.	Tanah Laut	Perebutan hak asuh anak	Pengaduan, konsultasi, penjangkauan, pengelolaan kasus, mediasi	3	3	100	
5.	Tanah Laut	Akses komunikasi dan bertemu anak	Pengaduan, konsultasi, penjangkauan, pengelolaan kasus, mediasi	2	2	100	
6.	Tanah Laut	Calon Pekerja Migran Indonesia	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Serah terima dan pemulangan)	4	4	100	
7.	Tanah Laut	Dugaan Penelantaran	Pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	1	1	100	
J u m l a h				21	21	100	

Sumber Data: UPTD PPA/DP3AP2KB Kab. Tanah Laut

Pelaihari, 13 Februari 2026

Kepala Dinas,



MARIA ULFAH, S.Psi, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197911132005012008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. A.Syairani Komp. Perkantoran Gagah, Pelaihari 70814
 Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

RINCIAN DATA JUMLAH KESELURUHAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG YANG MENDAPATKAN LAYANAN
OMPREHENSIF KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025

No	Nama (Inisial)	Kabupaten /Kota	Alamat	Jenis Laporan	Jenis Penanganan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	H	Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Kekerasan psikis dalam rumah tangga	Pengaduan, konsultasi, pengelolaan kasus	
2.	R A	Tanah Laut	Ds. Bumi Harapan Kec. Bumi Makmur	Kekerasan seksual/ persetubuhan	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
3.	R F	Tanah Laut	Ds. Jorong Kec. Jorong	Kekerasan fisik dalam rumah tangga/KDRT	Pengaduan, konsultasi, pengelolaan kasus	
4.	R A	Tanah Laut	Ds. Ujung Baru Kec. Bati-Bati	Perebutan pengasuhan anak	Pengaduan, konsultasi, penjangkauan, pengelolaan kasus	
5.	E	Tanah Laut	Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	Kekerasan psikis dalam rumah tangga	Pengaduan, konsultasi, pengelolaan kasus	
6.	HR	Tanah Laut	Ds. Atu-Atu Kec. Pelaihari	Perebutan pengasuhan anak	Pengaduan, konsultasi, pengelolaan kasus, mediasi	
7.	H S	Tanah Laut	Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	Akses komunikasi dan bertemu anak	Pengaduan, konsultasi, pengelolaan kasus	
8.	S R	Tanah Laut	Ds. Batu Tungku Kec. Panyipatan	Akses komunikasi dan bertemu anak	Pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, mediasi	
9.	S M	Tanah Laut	Ds. Panggung Kec. Pelaihari	Perebutan pengasuhan anak	Pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, mediasi	
10.	HD	Tanah Laut	Ds. Damit Hulu Kec. Batu Ampar	Dugaan Penelantaran Anak	Pengaduan, penjangkauan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
11.	MUS	Tanah Laut	Ds. Kintap Kec. Kintap	Kekerasan psikis dalam rumah tangga	Pengaduan, konsultasi, pengelolaan kasus	
12.	D M	Tanah Laut	Ds. Ketapang Kec. Bajuin	Kekerasan fisik/psikis dalam rumah tangga (KDRT)	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
13.	N R	Tanah Laut	Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Serah terima dan pemulangan)	
14.	KS	Tanah Laut	Ds. Batu Tungku Kec. Panyipatan	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Serah terima dan pemulangan)	

15.	J	Tanah Laut	Ds. Batu Tungku Kec. Panyipatan	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Serah terima dan pemulangan)	
16.	Ry	Tanah Laut	Ds. Batu Tungku Kec. Panyipatan	Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Serah terima dan pemulangan)	
17.	N F	Tanah Laut	Kel. Angsau Kec. Pelaihari	Kekerasan fisik dalam rumah tangga	Pengaduan, pengelolaan kasus, mediasi, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
18.	R W	Tanah Laut	Ds. Ketapang Kec. Bajuin	Kekerasan fisik/psikis dalam rumah tangga	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
19.	K S T N	Tanah Laut	Ds. Takisung Kec. Takisung	Kekerasan Psikis (permasalahan keluarga)	Pengaduan, pengelolaan kasus, mediasi, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
20.	Rd	Tanah Laut	Kel. Pelaihari Kec. Pelaihari	Kekerasan fisik/psikis dalam rumah tangga	Pengaduan, konsultasi, pengelolaan kasus	
21.	S S U	Tanah Laut	Kel. Angsau Kec. Pelaihari	Kekerasan psikis	Pengaduan, pengelolaan kasus, pendampingan (Pemeriksaan psikologis)	
J u m l a h						

Sumber Data : UPTD PPA/DP3AP2KB Kab. Tanah Laut

Pelaihari, 13 Februari 2026

Kepala Dinas,



MARIA ULFAH, S.Psi, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197911132005012008

1. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten/Kota

IKK No. 2.h.1

Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i>)
2. Rumus	:	$\frac{\text{Total Fertility Rate/TFR Kab/Kota}}{\text{Target Fertility Rate/TFR Kab/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap Kab/Kota yang Bersangkutan}} \times 100\%$ $= \frac{2,20}{2,19} \times 100\%$ $= 100,46\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Angka kelahiran total (<i>Total Fertility Rate</i>) adalah hasil perhitungan rata - rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa produksinya (15-49 tahun). ▪ Penyebut Pemerintah provinsi wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah terkait. Di sinilah target TFR disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing daerah.
5. Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat rincian perhitungan angka kelahiran total (TFR). ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat target TFR pemerintah Kab/Kota yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
6. Sumber Data	:	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Dasar Hukum	:	Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2025-2029.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA**

Jln. A.Syairani Komp. Perkantoran Gagah, Pelabuhan 70814
Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

**TOTAL FERTILITY RATE/TFR KAB/KOTA
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025**

No	Kelompok umur	Jumlah Kelompok Umur (ΣPfi)	Jumlah Kelahiran (ΣBi)	ASFR
1.	15 - 19 Tahun	14.966	390	26,0
2.	20 - 24 Tahun	15.103	2745	181,42
3.	25 - 29 Tahun	13.739	1621	117,98
4.	30 - 34 Tahun	14.033	981	69,91
5.	35 - 39 Tahun	14.321	579	40,43
6.	40 - 44 Tahun	14.743	54	3,66
7.	45 - 49 Tahun	13.795	34	2,46
J u m l a h			100.700	441,91

Perhitungan : ASFR

ΣBi

———— X 1000

ΣPfi

Keterangan :

Bi = jumlah kelahiran di dalam kelompok umur selama 1 tahun.

Pfi = jumlah perempuan kelompok umur pada suatu tahun tertentu.

Perhitungan : TFR

$441,91 \times 5 (26,0 + 181,42 + 117,98 + 69,91 + 40,43 + 3,66 + 2,46)$

1000

= 2,20

Pelaihari, 13 Februari 2026

Kepala Dinas,



MARIA ULFAH, S.Psi, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197911132005012008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. A.Syairani Komp. Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814
Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

TARGET FERTILITY RATE/TFR PROVINSI YANG DITETAPKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025

No	Uraian Dokumen	Target TFR Provinsi Kalimantan Selatan	Keterangan										
(1)	(2)	(3)	(4)										
1.	Berdasarkan dokumen perencanaan Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Laut	2,19	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA										
			6	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	positif	Nilai	62,6	64	65,2	66,4	67,6	68,7	69,7
			7	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	negatif	Angka	2,2	2,19	2,18	2,16	2,15	2,15	2,14

Sumber Data: Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Pelaihari, 13 Februari 2026

Kepala Dinas,



MARIA ULFAH, S.Psi, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197911132005012008

IKK No. 2.h.2**Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)*****Penjelasan IKK**

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern
2. Rumus	:	$\frac{\text{Total peserta KB Aktif Modern}}{\text{Total Pasangan Usia Subur Usia 15- 49 Tahun}} \times 100\%$ $= \frac{44.303}{58.516} \times 100\%$ $= 75,71\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus- menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan. ▪ Penyebut Jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) di wilayah kab/kota.
5. Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat daftar peserta KB aktif modern per kecamatan di kabupaten/kota. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur di wilayah kab/kota.
6. Sumber Data	:	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jln. A.Syairani Komp. Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814
Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

**PERSENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN (*MODERN
CONTRACEPTIVE PREVALENCE RATE/MCPR*)**

**JUMLAH PESERTA KB AKTIF MODERN KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025**

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PESERTA KB AKTIF	METODE KONTRASEPSI MODERN									METODE KONTRASEPSI TRADISIONAL
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL	
1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Σ(4-11)	13
01	TAKISUNG	4935	2121	2255	54	294	46	5	149	4	4928	7
02	JORONG	4345	2790	907	71	416	48	0	99	3	4334	11
03	PELAIHARI	7666	4298	2232	103	559	216	14	216	2	7640	26
04	KURAU	1999	1242	562	23	139	10	3	19	0	1998	1
05	BATI BATI	5939	2839	2433	48	424	89	0	98	0	5931	8
06	PANYIPATAN	3472	2226	605	71	429	69	2	64	2	3468	4
07	KIN TAP	4950	2733	1526	79	364	66	10	144	5	4927	23
08	TAMBANG ULANG	2583	1197	965	52	290	21	0	54	3	2582	1
09	BATU AMPAR	3870	2111	925	91	408	140	6	173	0	3854	16
10	BAJUIN	2867	1179	1007	64	324	157	2	131	0	2864	3
11	BUMI MAKMUR	1797	866	740	19	119	5	2	26	0	1777	20
JUMLAH TOTAL		44423	23602	14157	675	3766	867	44	1173	19	44303	120

Sumber Data:

Aplikasi SIGA BKKBN/DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut

Pelaihari, 13 Februari 2026

Kepala Dinas,



MARIA ULFAH, S.Psi, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197911132005012008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. A.Syairani Komp. Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814

Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

TOTAL PASANGAN USIA SUBUR USIA 15-49 TAHUN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2026

No	Kecamatan	Pasangan Usia Subur (PUS)	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TAKISUNG	6261	
2	JORONG	5770	
3	PELAIHARI	10694	
4	KURAU	2654	
5	BATI BATI	7569	
6	PANYIPATAN	4563	
7	KINTAP	6804	
8	TAMBANG ULANG	3521	
9	BATU AMPAR	4821	
10	BAJUIN	3592	
11	BUMI MAKMUR	2267	
J u m l a h		58516	

Sumber Data: DP3AP2KB Kabupaten Tanah Laut

Pelaihari, 13 Februari 2026

Kepala Dinas,



MARIA ULFAH, S.Psi, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197911132005012008

IKK No. 2.h.3**Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)****Penjelasan IKK**

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)
2. Rumus	:	$\frac{\text{Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota}}{\text{Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$ $= \frac{4,93}{7,60} \times 100\%$ $= 64,87\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase (%)
4. Definisi Operasional	:	▪ Pembilang Persentase pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi di wilayah kab/kota. ▪ Penyebut Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>) provinsi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk provinsi yang bersangkutan, dan tercantum dalam dokumen perencanaan daerah
5. Data Pendukung	:	▪ Pembilang Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat jumlah pasangan usia subur yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani (<i>unmet need</i>) di wilayah kab/kota. ▪ Penyebut Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi yang memuat target <i>unmet need</i> pemerintah provinsi yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
6. Sumber Data	:	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
7. Dasar Hukum	:	▪ Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. A.Syairani Komp. Perkantoran Gagas, Pelaihari 70814

Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KELUARGA BERENCANA
YANG TIDAK TERPENUHI (*UNMET NEED*) KAB/KOTA
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025

No	Kabupaten/Kota	PUS Bukan Peserta KB					Ket
		HAMIL	IAS	IAD	TIAL	<i>Unmetneed</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= 3+4+5+6	(8)
1	Tanah Laut	19	1,100	634	1,132	2,885	

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
1	Tanah Laut	58,516

$$= \frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100 \%$$

$$= \frac{2,885}{58,516} \times 100\%$$

$$= 4,93\%$$

Pelaihari, 13 Februari 2026

Kepala Dinas,



MARIA ULFAH, S.Psi, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197911132005012008



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. A.Syairani Komp. Perkantoran Gagas, Pelayhari 70814

Email : dinasp3ap2kbtanahlaut@gmail.com

TARGET PERSENTASE KEBUTUHAN BER-KELUARGA BERENCANA YANG
TIDAK TERPENUHI (UNMET NEED) KAB/KOTA YANG DITETAPKAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT UNTUK PROVINSI YANG BERSANGKUTAN
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2025

No	Uraian Dokumen	Target Unmet Need	Ket											
(1)	(2)	(3)	(4)											
1.	Berdasarkan dokumen perencanaan Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029 Kabupaten Tanah Laut	7,6	Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas P3AP2KB Kabupaten Tanah Laut <table><tr><td>9</td><td>Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)</td><td>negatif</td><td>%</td><td>4,45</td><td>7,6</td><td>7,3</td><td>7</td><td>6,8</td><td>6,65</td><td>6,5</td></tr></table>	9	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	negatif	%	4,45	7,6	7,3	7	6,8	6,65	6,5
9	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	negatif	%	4,45	7,6	7,3	7	6,8	6,65	6,5				

Sumber Data : Renstra DP3AP2KB Tahun 2025-2029

Pelayhari, 13 Februari 2026

Kepala Dinas,



MARIA ULFAH, S.Psi, M.M
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197911132005012008